

**Keputusan Wali Kota  
No. 000.7.2/446/2025  
Lampiran III**



# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

**INSPEKTORAT**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA SALATIGA**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Dan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rancangan awal renja PD sebagai persiapan penyusunan Renja Inspektorat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan.

Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis yang menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat yaitu tuntutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana termuat dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kota Salatiga memfokuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Renja Inspektorat Daerah disusun dengan maksud untuk mengarahkan pelayanan Inspektorat Daerah khususnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah untuk :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
2. Mewujudkan aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen Renja Inspektorat Daerah sebagai pedoman pencapaian program RPJMD selama satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Salatiga.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama satu tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH**  
**TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT**  
**DAERAH**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian visi dan misi, sehingga dapat dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Total anggaran belanja Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.205.632.011,- dengan realisasi sebesar 8.375.054.773,- atau 90,98 % Anggaran tersebut terdiri atas 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan serta 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2024 mempunyai 3 (tiga) program utama dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini Dengan total pagu tahun 2024 Rp.8.186.772.107 dengan realisasi tahun 2024 Rp. 7.675.297.223,- atau 93,75 % melalui kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini dengan total pagu anggaran tahun 2024 104.037.000,- dengan realisasi tahun 2024 Rp. 26.523.750,- atau 25,49% melalui kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.  
Program ini dengan total pagu anggaran tahun 2024 Rp. 914.822.904,- dengan realisasi tahun 2024 Rp.673.233.800,- atau 73,59 % melalui kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
  - b. Pendampingan dan Asistensi.

**I. Realisasi Program, Kegiatan dan sub. Kegiatan Inspektorat Tahun 2024**

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**  
dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja sebagai berikut :

**1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

a. Input

Dana : 5.000.000,-  
Realisasi : 2.324.000,- keu: 46,48% dan fisik : 100%

b. Output :

Jumlah laporan keuangan LKjIP, LKPj, LPPD, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja, Register Resiko RTP, IKM, POK, Forum OPD, PMPRB dan PMPZI Inspektorat Daerah yang di targetkan 11 dokumen dapat terealisasi.

c. Outcome :

Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi.

**1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

a. Input

Dana : 6.297.659.011,-  
Realisasi : 5.941.022.860,- Keu : 94,34% Fisik : 100%

b. Output :

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Inspektorat yang di targetkan 40 orang dapat terealisasi

c. Outcome :

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi.

**1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

a. Input

Dana : 17.500.800,-

Realisasi : 17.280.000,- Keu : 98,74% Fisik : 100%

b. Output :

Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang ditargetkan 12 bulan dapat terealisasi

c. Outcome :

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

**1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

**1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**

a. Input

Dana : 22.500.000

Realisasi : 17.239.450 Keu : 76,62 Fisik : 100%

b. Output :

Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (asuransi kendaraan dinas roda 4) yang ditargetkan 1 dokumen dapat terealisasi

c. Outcome :

Terlindunginya kendaraan dinas roda 4 yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

**1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**1.4.1 Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai**

a. Input

Dana : 3.000.000,-

Realisasi : 0,- Keu : 0 % Fisik : 80%

b. Output :

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang di targetkan 1 dokumen dapat terealisasi

c. Outcome :

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan yang di targetkan 42 orang dapat terealisasi

**1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

a. Input

Dana : 360.000.000,-

Realisasi : 342.191.000,- Keu: 95,05 % Fisik:100%

b. Output :

✓ Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (PKS dan peningkatan kapabilitas APiP) yang ditargetkan 42 orang dapat terealisasi.

c. Outcome :

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan yang di targetkan 42 orang dapat terealisasi

**1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

a. Input

Dana : 9.000.000,-

Realisasi : 8.825.500,- Keu :98,06% Fisik :100%

b. Output :

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan yang di targetkan 6 paket dapat terealisasi.

c. Outcome :

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi.

**1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

a. Input

Dana : 14.006.400,-

Realisasi : 13.597.500,- Keu : 97,08 % Fisik : 100%

- b. Output :  
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan yang ditargetkan 12 paket dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

- a. Input  
Dana : 57.550.000,-  
Realisasi : 52.123.600,- Keu : 90,57% Fisik : 100%
- b. Output :  
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang ditargetkan 12 paket dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

- a. Input  
Dana : 25.000.000,-  
Realisasi : 23.574.900,- Keu : 94,30% Fisik : 100%
- b. Output :  
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang ditargetkan 24 paket dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **1.5.5 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Input  
Dana : 3.102.000,-  
Realisasi : 2.580.000,- Keu : 83,17 % Fisik : 100%
- b. Output :  
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yang ditargetkan 12 dokumen dapat terealisasi.

- c. Outcome :  
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **1.5.6 Fasilitas Kunjungan Tamu**

- a. Input  
Dana : 15.000.000,-  
Realisasi : 12.740.000,- Keu : 84,93% Fisik : 100%
- b. Output :  
Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang disediakan yang ditargetkan 12 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

- a. Input  
Dana : 440.000.000,-  
Realisasi : 385.086.166,- Keu : 87,52% Fisik : 100%
- b. Output :  
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang di targetkan 120 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

### **1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

#### **1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

- a. Input  
Dana : 284.913.500,-  
Realisasi : 276.419.500,- Keu : 97,02% Fisik : 100%
- b. Output :  
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan yang di targetkan 37 unit dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

## **1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

### **1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

#### **a. Input**

Dana : 2.500.000,-

Realisasi : 1.092.000,- Keu : 43,68% Fisik : 100%

#### **b. Output :**

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (perangko, materai dan jasa pengiriman surat) yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **c. Outcome :**

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

### **1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

#### **a. Input**

Dana : 37.238.000,-

Realisasi : 28.476.588,- Keu : 76,47% Fisik : 100%

#### **b. Output :**

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan yang ditargetkan 12 bulan dapat terealisasi

#### **c. Outcome :**

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

### **1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

#### **a. Input**

Dana : 18.000.000,-

Realisasi : 12.000.000,- Keu : 66,66 % Fisik : 100%

#### **b. Output :**

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan di targetkan 12 laporan dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi.

#### **1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

a. Input

Dana : 186.116.896,-

Realisasi : 184.095.262,- Keu : 98,91% Fisik : 100%

b. Output :

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jasa tenaga administrasi 2 orang, tenaga kebersihan 1 orang dan tenaga administrasi kearsipan 3 orang) yang disediakan di targetkan 12 laporan dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

a. Input

Dana : 25.480.600,-

Realisasi : 22.838.000,- Keu : 89,63% Fisik : 100%

b. Output :

Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (1 unit roda 4) yang di targetkan 1 unit dapat terealisasi

c. Outcome :

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

## **1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

### **a. Input**

Dana : 204.754.900,-

Realisasi : 177.778.797,- Keu : 86,83% Fisik : 100%

### **b. Output :**

Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya yang dipelihara ( 9 unit roda 4 dan 9 unit roda 2) yang ditargetkan 18 unit dapat terealisasi

### **c. Outcome :**

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

## **1.8.3 Pemeliharaan Mebel**

### **a. Input**

Dana : 9.000.000,-

Realisasi : 9.000.000,- Keu : 100% Fisik : 100%

### **b. Output :**

Jumlah mebel yang dipelihara yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

### **c. Outcome :**

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

## **1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

### **a. Input**

Dana : 40.000.000,-

Realisasi : 44.155.000,- Keu : 98,12% Fisik : 100%

### **b. Output :**

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang ditargetkan 39 unit dapat terealisasi

### **c. Outcome :**

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

### **1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

#### **a. Input**

Dana : 102.446.000,-

Realisasi : 100.597.100,- Keu : 98,20 % Fisik : 100%

#### **b. Output :**

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **c. Outcome :**

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

### **1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya**

#### **a. Input**

Dana : 2.004.000,-

Realisasi : 260.000,- Keu : 12,97 % Fisik : 100%

#### **b. Output :**

Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (gorden, taplak meja, karpet) yang ditargetkan 1 unit dapat terealisasi

#### **c. Outcome :**

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja sebagai berikut :

### **2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

#### **2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

##### **a. Input**

Dana : 11.944.000,-

Realisasi : 8.176.000,- Keu : 68,45 % Fisik : 95%

- b. Output :  
Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah yang ditargetkan 45 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**

- a. Input  
Dana : 8.471.000,-  
Realisasi : 3.466.000,- Keu : 40,92 % Fisik : 95%
- b. Output :  
Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah yang di targetkan 30 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **2.1.3 Reviu Laporan Kinerja**

- a. Input  
Dana : 3.120.000,-  
Realisasi : 2.960.000,- Keu : 94,87 % Fisik : 95%
- b. Output :  
Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang ditargetkan 5 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **2.1.4 Reviu Laporan Keuangan**

- a. Input  
Dana : 7.957.000,-  
Realisasi : 4.436.000.- Keu : 55,75 % Fisik : 100%
- b. Output :  
Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan yang ditargetkan 40 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :  
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

### **2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal**

#### **a. Input**

Dana : 6.159.000,-

Realisasi : 2.151.750,- Keu: 34,94 % Fisik : 95%

#### **b. Output :**

Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk ditargetkan 1 kesepakatan dapat terealisasi

#### **c. Outcome :**

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi.

### **2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

#### **a. Input**

Dana : 26.790.000,-

Realisasi : 4.650.000,- Keu : 17,36 % Fisik : 100 %

#### **b. Output :**

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

#### **c. Outcome :**

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

## **2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu**

### **2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah**

#### **a. Input**

Dana : 22.350.000,-

Realisasi : 540.000,- Keu : 2,42 % Fisik : 100%

#### **b. Output :**

Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara / Daerah yang ditangani yang di targetkan 1 laporan dapat terealisasi

#### **c. Outcome :**

Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah dan pengawasannya dengan tujuan tertentu yang di target 1 tahun dapat terealisasi.

### **2.2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**

a. Input

Dana : 17.246.000,-

Realisasi : 144.000,- Keu : 0,83% Fisik : 90%

b. Output :

Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang di targetkan 10 laporan dapat terealisasi 7 laporan sesuai jumlah pengawasan tujuan yang dilaksanakan

c. Outcome :

Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah dan pengawasannya dengan tujuan tertentu yang di target 1 tahun dapat terealisasi

### **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja sebagai berikut :**

#### **3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan**

##### **3.1.1 Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan**

a. Input

Dana : 5.000.000,-

Realisasi : 768.000,- Keu : 15,36 % Fisik : 95%

b. Output :

Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang di susun yang di targetkan 5 rekomendasi dapat terealisasi

c. Outcome :

Tersedianya kebijakan teknis pengawasan yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

#### **3.2 Pendampingan dan Asistensi**

##### **3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**

a. Input

Dana : 394.864.004,-

Realisasi : 381.286.200,- Keu : 97% Fisik : 100%

b. Output :

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah yang di targetkan 5 rekomendasi dapat terealisasi

c. Outcome :

Terlaksananya tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN, akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi.

**3.2.2 Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi**

a. Input

Dana : 25.840.000,-

Realisasi : 4.790.000,- Keu : 18,54 % Fisik : 100%

b. Output :

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi urusan Pemerintah Daerah yang di targetkan 32 perangkat daerah dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

**3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

a. Input

Dana : 431.746.900,-

Realisasi : 245.954.600,- Keu : 56,97% Fisik : 100

b. Output :

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan korupsi yang di targetkan 32 perangkat daerah dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

**3.2.4 Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas**

a. Input

Dana : 57.372.000,-

Realisasi : 40.435.000,- Keu : 70,48% Fisik : 100%

b. Output :

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang di targetkan 32 perangkat daerah dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

## **II. Faktor, Implikasi Target Kinerja dan Kebijakan**

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan adalah adanya rencana *time schedule*, pengintensifan pelaksanaan rapat dan koordinasi pada kegiatan dan sub kegiatan terkait sehingga pencapaian target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dapat tercapai sedangkan faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Inspektorat Daerah atas pemenuhan target kinerja kegiatan adalah mendukung capaian kinerja perangkat daerah.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 tercantum pada Tabel T-C.29.

**Tabel T - C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja (Renja Inspektorat Daerah) dan**  
**Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kota Salatiga**

Kode	Urusan / Urusan Bidang / Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode Renstra Inspektorat (tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja & Anggaran Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan penunjang</b>									
	<b>Urusan Bidang Pengawasan</b>	Kapabilitas APIP (Level)	3	3,04	3,00	3,000	100,00	3	9,04	2,26
		Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,00	3,06	3,003	98,14	3,06	9,06	2,27
		Skor IEPK (%)	3,00	2,80	2,96	2,802	94,66	2,96	8,56	2,14
		Skor MRI (%)	3,00	2,87	2,86	2,897	101,29	2,86	8,63	2,16
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	81	80,00	81,58	101,98	84	246,68	61,67
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100,00	100	300	75,00

Kode	Urusan / Urusan Bidang / Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode Renstra Inspektorat (tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja & Anggaran Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14	14	14	14	100,00	14	42	10,50
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	300	75,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46	40	42	42	100,00	40	122	30,50
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100,00	1	3	0,75
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	300	75,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100,00	1	3	0,75
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	300	75,00

Kode	Urusan / Urusan Bidang / Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode Renstra Inspektorat (tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja & Anggaran Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-		-	-	#DIV/0!	-	-	-
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100,00	1	3	0,75
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42	42	42	42	100,00	42	126	31,50
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00		200	50,00
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	6	6	6	6	100,00	6	18	4,50
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	100,00	12	36	9,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26	26	26	26	100,00	26	78	19,50

Kode	Urusan / Urusan Bidang / Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode Renstra Inspektorat (tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja & Anggaran Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24	24	24	24	100,00	24	72	18,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	12	12	100,00	12	36	9,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100,00	1	3	0,75
		Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120	120	120	120	100,00	120	360	90,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100,00		200	50,00
		Pengadaan Mebel	-		-	-		-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		-	-		-	-	-

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100,00		200	50,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100,00	12	36	9,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	36	9,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	36	9,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	36	9,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100,00		200	50,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100,00	1	3	0,75
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	18	18	18	100,00	18	54	13,50

				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	1	1	1	100,00	1	3	0,75
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	39	39	39	100,00	39	117	29,25
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100,00	1	3	0,75
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100,00	1	3	0,75
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	82	91,05	80	90,86	113,58	80	261,91	65,48
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	90	95,87	88	94,41	107,28	88	278,28	69,57
					Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP	75	45	45	87	193,33	45	177,00	44,25
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	100	100	100	100,00	100	300	75,00
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48	48	48	48	100,00	48	144,00	36,00
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	26	26	100,00	26	78,00	19,50
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	4	4	4	100,00	4	12,00	3,00
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	12	12	12	100,00	12	36,00	9,00

				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1	1	1	100,00	1	3,00	0,75
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	4	4	4	100,00	4	12,00	3,00
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	100	100	100	100,00	100	300	75,00
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	1	1	1	100,00	1	3,00	0,75
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	10	10	10	100,00	10	30,00	7,50
				<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Nilai MCP Korsupgah KPK	86	83	84	94,58	112,60	84	262	65,40
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	100	100	100	100,00		200	50,00
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	5	5	5	100,00	5	15	3,75

					Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100	100	100	100	100,00		200	50,00
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32	32	32	32	100,00	32	96	24,00
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32	32	32	32	100,00	32	96	24,00
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	7	7	7	100,00	7	21	5,25
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32	32	32	32	100,00	32	96	24,00

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Daerah Kota Salatiga selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) fokus pada penguatan pengawasan dalam rangka pengawasan yang lebih efektif untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan strategi Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang Pengawasan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **1. QA SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)**

*Quality Assurance* (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan nilai 3 dan tahun 2024 dengan nilai 3,004 telah menunjukkan trend kenaikan pertumbuhan kinerja tetapi belum ada peningkatan capaian nilai yang berarti dari tahun ke tahun. Komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern serta semangat meningkatkan pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Salatiga sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan level QA SPIP.

## **2. QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)**

*Quality Assurance* (QA) IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 masih NA karna perhitungan indeks IEPK dimulai tahun 2022 dengan capaian 2,973 tahun 2023 dengan capaian 2,800 dan tahun 2024 dengan capaian 2,802 dimana capaian ini masih di level 2 sehingga masih perlu ditingkatkan sehingga capaian kinerja level 3 dapat dicapai. Kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,802 (level 2) disebabkan belum adanya identifikasi risiko *fraud* dan kemitraan dan atas efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko belum dilakukan secara konsisten. Untuk mencapai perlu upaya pengendalian risiko korupsi dengan mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup 3 prinsip pengelolaan risiko korupsi yakni cegah, deteksi dan respon serta mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.

## **3. QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)**

QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 masih NA karna perhitungan indeks IEPK dimulai tahun 2022 dengan capaian 2,871, tahun 2023 dengan capaian 2,891 dan tahun 2024 dengan capaian 2,897 dimana capaian ini masih di level 2 sehingga masih perlu ditingkatkan sehingga capaian kinerja level 3 dapat dicapai. Untuk mencapai level 3 pemerintah kota salatiga perlu memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko. Tercapainya nilai QA MRI sesuai dengan target nilai yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk komitmen jajaran APIP untuk melakukan upaya secara terus menerus guna meningkatkan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi unit pemilik risiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

#### **4. Kapabilitas APIP**

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan, yang ditunjang oleh dukungan pengawasan yang baik, sehingga menghasilkan pengawasan berkualitas dan mewujudkan perannya secara efektif capaian kinerja tahun 2020 s.d 2024 dengan nilai capaian 3 telah menunjukkan trend kinerja yang stabil walaupun masih banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka mempertahankan hasil capaian Kapabilitas APIP Level 3 dan persiapan capaian Level 4 (Managed) dengan mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata Kelola dan manajemen risiko.

Capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut :

##### **a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern**

Pengawasan Internal pemerintah daerah yang tertuang dalam LHP bertujuan memberikan jaminan kualitas (*Quality Assurance / QA*) bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan internal di Kota Salatiga dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Itprov). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah dokumen yang memuat informasi tentang temuan-temuan dan rekomendasi menurut kriteria / standar pengawasan tertentu yang telah ditetapkan oleh pengawas. Hasil perhitungan laporan Tindak Lanjut Internal tahun 2024 di Kota Salatiga adalah 90,85%. Hasil TLHP internal terdiri atas penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat Kota Salatiga (83,21%), BPKP Provinsi Jateng (89,36%) dan Inspektorat Provinsi Jawa tengah (100%). Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 80%, dengan persentase 116,47%. Capaian persentase penyelesaian TLHP Internal tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023

adalah 91,05% (menurun 0,2%) karena adanya peningkatan rekomendasi atas temuan LHP yang belum terselesaikan oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir.

**b. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI**

Pemeriksaan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yang dalam hal ini dilakukan oleh BPK yang bertujuan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah akurat dan mematuhi peraturan. Hasil opini Pengawasan BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPK dengan 4 (empat) opini yang dapat diberikan yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Penyelesaian rekomendasi atas TLHP Pengawasan Eksternal dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan dan dapat diterapkan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh jajarannya di internal OPD dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil perhitungan laporan tindak lanjut BPK RI tahun 2024 adalah 94,41%. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 88% dengan persentase 107,28% Capaian persentase penyelesaian TLHP Eksternal (BPK) tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 adalah 95,87% (menurun 1,46%) karena di tahun 2024 telah terbit 2 LHP BPK yaitu Audit Kinerja Mandatory Spending dan Audit Laporan Keuangan Kota Salatiga yang belum terselesaikan oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir.

**c. Nilai MCP Korsupgah KPK**

Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi dengan menggunakan *platform*

dalam aplikasi Jaga.id yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan menilai upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 2024 dengan capaian 94,58% mengalami kenaikan dibandingkan hasil capaian pada periode tahun 2023 dengan hasil capaian 88,08% dengan hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada peringkat 71 dari 542 Instansi secara nasional dan berada dalam urutan ke 25 dari 36 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 84% dengan persentase 112,59%.

**d. Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP**

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. SAKIP merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan utama yang menjadi potret kinerja suatu instansi pemerintah. Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP adalah jumlah OPD yang meningkat nilai evaluasi SAKIP selama 2 tahun terakhir dibagi total OPD. Hasil perhitungan jumlah OPD meningkat nilai evaluasi SAKIP perbandingan tahun 2023 dan 2024 adalah 87%. Jumlah OPD yang naik nilai SAKIP nya adalah 27 OPD sedangkan OPD yang turun nilai SAKIP nya adalah 4 OPD dari total 31 OPD sebagai Obrik. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 45% dengan persentase 193,33%.

**e. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Hasil Capaian Nilai SKM Inspektorat Daerah Kota Salatiga semester 1 tahun 2024 adalah 81,96 dan semester 2 tahun 2024 adalah 81,20 dimana nilai rata-rata SKM Inspektorat

Salatiga tahun 2024 sebesar 81,58 mengalami kenaikan 0,49 dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian 81,09. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 80 dengan persentase 101,975% .

Pada pembahasan sub bab ini kami sajikan Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat dengan format tabel terlampir.



## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1) QA SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	3,06	3,003	98,14%	QA SPIP (Sistem Pengendalian Pemerintah) dengan nilai 3,00 (level 3) adalah kondisi dimana K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Kurang optimalnya nilai QA SPIP Inspektorat Daerah Kota Salatiga disebabkan masih adanya temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama 5 tahun terakhir dan belum adanya keselarasan sasaran strategis Pemerintah Daerah serta penetapan target dan indikator kinerja yang digunakan pada level OPD maupun Pemerintah Daerah. Meskipun sejak tahun 2018 capaian QA SPIP berada di level 3 tetapi belum ada peningkatan capaian nilai yang berarti dari tahun ke tahun. Komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern serta semangat meningkatkan pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan level QA SPIP.
2) QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	2,96	2,802	94,66%	Kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,802 (level 2) disebabkan belum adanya penilaian risiko korupsi yang digunakan dalam rangka mitigasi risiko korupsi dan penyusunan regulasi terkait <i>Fraud Control Plan</i> . Untuk mencapai perlu upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam FCP yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi dengan 3 pilar yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi. Komitmen jajaran APIP untuk melaksanakan program anti korupsi melalui kegiatan penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi serta penyusunan kebijakan <i>Fraud Control Plan</i> oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan level QA IEPK.
3) QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	2,86	2,897	101,29%	Hasil QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dengan nilai 2,897 (level 2) disebabkan belum adanya kebijakan terkait Manajemen Risiko dan penerapan manajemen risiko belum dilakukan semua kemitraan yang memiliki peran penting dalam organisasi. Untuk mencapai level 3 pemerintah kota salatiga perlu memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko. Tercapainya nilai QA MRI sesuai dengan target nilai yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk komitmen jajaran APIP untuk melakukan upaya secara terus menerus guna meningkatkan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi unit pemilik risiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

4)	Kapabilitas APIP	3	3	100%	Tercapainya level kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada level 3 (tiga) sejak tahun 2018 merupakan hasil dari komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern yang berfungsi sebagai <i>early warning system</i> dan pencegahan dini akan kemungkinan terjadi <i>fraud</i> dalam tata kelola Pemerintahan Daerah. Hasil capaian ini tidak membuat Inspektorat berpuas hati, masih banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka mempertahankan hasil capaian Kapabilitas APIP Level 3 dan persiapan capaian Level 4 (Managed) dengan mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata Kelola dan manajemen risiko dengan outcome APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
5)	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,58	101,98%	Tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kota Salatiga dengan nilai 81,58 merupakan hasil dari komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas layanan pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Salatiga. Pembenahan dan perbaikan akan terus dilakukan untuk mempertahankan hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, pemanfaatan teknologi terkait layanan konsultasi secara daring, serta melakukan sosialisasi pelayanan klinik konsultasi APIP melalui sosial media, pawai penegakan integritas dan pemanfaatan radio Pemerintah Kota Salatiga secara berkelanjutan

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga, telah dirumuskan tujuh (3) program dengan indikator keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan serta hasil evaluasi rencana aksi program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Renstra	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2024	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Indikator Program Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>					
1.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	88	90,86	103,25	Hasil perhitungan laporan Tindak Lanjut Internal tahun 2024 di Kota Salatiga adalah 90,85%. Hasil TLHP internal terdiri atas penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat Kota Salatiga (83,21%), BPKP Provinsi Jateng (89,36%) dan Inspektorat Provinsi Jawa tengah (100%). Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 80%, dengan persentase 116,47%.
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	84	94,41	112,40	Hasil perhitungan laporan tindak lanjut BPK RI tahun 2024 adalah 94,41%. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 88% dengan persentase 107,28%
3	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	45	87	193,33	Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 2024 dengan capaian 94,58% mengalami kenaikan dibandingkan hasil capaian pada periode tahun 2023 dengan hasil capaian 88,08% dengan hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada peringkat 71 dari 542 Instansi secara nasional dan berada dalam urutan ke 25 dari 36 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 84% dengan persentase 112,59%.

Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						
4	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	84	94,58	112,60	Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 2024 dengan capaian 94,58% mengalami kenaikan dibandingkan hasil capaian pada periode tahun 2023 dengan hasil capaian 88,08% dengan hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada peringkat 71 dari 542 Instansi secara nasional dan berada dalam urutan ke 25 dari 36 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 84% dengan persentase 112,59%.
Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	81,58	101,98	Hasil perhitungan jumlah OPD meningkat nilai evaluasi SAKIP perbandingan tahun 2023 dan 2024 adalah 87%. Jumlah OPD yang naik nilai SAKIP nya adalah 27 OPD sedangkan OPD yang turun nilai SAKIP nya adalah 4 OPD dari total 31 OPD sebagai Obrik. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 45% dengan persentase 193,33%.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan Tugas Pokok Fungsi

1. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan (PKPT) yang Berbasis Risiko;
2. Belum efektifnya penerapan SPIP pada perangkat daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan;
4. Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang berulang;
5. Adanya pengaduan masyarakat yang tidak lewat kanal aduan sehingga berpotensi untuk tidak tertangani
6. Belum optimalnya pengelolaan saluran pengaduan bagi *Whistleblower System* (WBS) dan pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah (PWKKND);
7. Kurang optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat, BPKP dan Inspektorat Provinsi);
8. Kurang optimalnya hasil Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI);
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terlambat menjadi kurang bermanfaat bagi pengendalian internal organisasi;
10. Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak bisa ditindaklanjuti berpotensi menyebabkan kerugian daerah
11. Belum optimalnya Penyuluhan Anti Korupsi bagi Internal dan Eksternal sebagai upaya pencegahan korupsi di kota salatiga;

12. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama APIP dengan stakeholder dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi
  13. Belum terwujudnya OPD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi;
  14. Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan Pengelolaan data administrasi pengawasan digital;
  15. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik digital di inspektorat.
3. Permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah di luar tugas pokok fungsi
1. Kurang komitmen dan pemahaman dari organisasi Perangkat Daerah dan segenap jajarannya terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bisa menghambat perkembangan organisasi dan menimbulkan celah kejadian korupsi yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Daerah;
  2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
  3. Kurangnya sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah.
4. Permasalahan Inspektorat Daerah dilihat dari isu Pengarusutamaan Gender (PUG)
1. Masih rendahnya pengawas yang memahami Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) karena belum semua pengawas mengikuti pelatihan pengawasan Anggaran Responsif Gender (ARG);
  2. Pelaksanaan pengawasan Internal belum menyentuh pemeriksaan anggaran Responsif Gender dalam setiap penugasan pengawasan
  3. Pelaksanaan pengawasan Tujuan Tertentu dan Aduan Masyarakat belum menyentuh pemeriksaan anggaran Responsif Gender dalam setiap penugasan pengawasan;

4. Kurangnya penguasaan APIP terhadap teknik penanganan Pengaduan Masyarakat yang responsif gender karena belum semua mendapatkan pelatihan investigasi dan PUG

5. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

No	Program Prioritas Wali Kota	Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dampak Terhadap Program Nasional	Hubungan dengan NSPK	Hubungan dengan SPM	Hubungan dengan SDGS
1.	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan  Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Adanya harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana memberikan dukungan dan selaras dengan program Nasional yang termuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 7 yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Upaya Pencegahan Korupsi harus meningkatkan Indeks Integritas Nasional (SPI) Pemerintah Daerah	Pengawasan APIP memperhatikan jenis dan mutu pelayanan pengawasan yang wajib diterapkan dalam menjalankan tugas yang bertujuan memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Pengawasan APIP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tersebut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan tujuan SDGs lainnya melalui pengawasan dan pembinaan

6. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah disusun dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Analisis terhadap kondisi internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi, yang kemudian akan menghasilkan kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, yang kemudian akan menghasilkan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

**a. Kekuatan (*Strength*)**

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai;
3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit dalam pelaksanaan pengawasan;
4. Penggunaan Teknologi dan sistem pengawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan;
5. Adanya anggaran pelatihan dan sertifikasi APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

**b. Kelemahan (Weaknesses)**

Sedangkan kelemahan (*Weaknesses*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Rendahnya inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan pengawasan;
2. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP;
3. Keterbatasan jumlah SDM Pengawasan dan Kesekretariatan;
4. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai keahlian pengawasan dan kemampuan teknis substantif APIP yang merata;
5. Kendala dalam Komunikasi baik internal maupun dengan Obyek Pemeriksaan (Obrik).

**c. Peluang (Opportunities)**

Sedangkan peluang (*Opportunities*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Kemajuan teknologi dan sistem pengawasan digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis sistem informasi;
2. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain ( APIP di Inspektorat Kab/Kota lain, Inspektorat Provinsi, dan BPKP, Pengawas Eksternal (BPK) serta APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Adanya upaya Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi untuk mengukur capaian kinerja pemerintah;

4. Peningkatan pelayanan APIP dan saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi publik upaya pencegahan korupsi;
5. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang semula hanya sebagai pendeteksi masalah (*Watchdog*) bergeser dengan fungsi konsultasi dan Penjamin Mutu / (*Quality Assurance*);
6. Adanya edaran bersama nomor 11 tahun 2024 tentang penguatan APIP Daerah meliputi anggaran pengawasan, SDM, Independensi dan objektivitas, peran dan layanan APIP.

**d. Tantangan (Threats)**

Sedangkan tantangan yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah:

1. Adanya intervensi politik yang dapat mengurangi independensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. Munculnya modus baru dalam praktek fraud / kecurangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Adanya penolakan dari pihak yang terancam sehingga melakukan upaya menghalangi / sabotase / perlawanan terhadap upaya penguatan pengawasan;
4. Risiko keamanan data dan informasi karena serangan siber yang menimbulkan peretasan dan kebocoran data;
5. Pimpinan yang kurang konsisten dalam penerapan kebijakan pencegahan korupsi yang menimbulkan perbedaan *Judgment* pengawasan.

7. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Inspektorat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Inspektorat Daerah			Isu Strategis Inspektorat Daerah
			Global	Regional	Nasional	
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.	Belum optimalnya penguatan pengawasan Intern pemerintah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang terintegrasi dengan didukung SDM APIP yang kompeten	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek <i>strategis, insight &amp; foresight</i> (AAIPI 2024)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

## 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2026

### 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Total pagu Inspektorat Daerah dalam penetapan RKPD tahun 2026 adalah Rp. 12.560.247.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan anggaran dalam Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025 – 2029 Rp. 15.329.765.861, mengalami penurunan sebesar Rp. 2.769.518.861,- Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 yang telah dengan alokasi anggaran telah sesuai kebutuhan pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi Inspektorat Daerah dengan memperhitungkan kekuatan anggaran daerah serta alokasi anggaran *Mandatory Spending* Pengawasan yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menindaklanjuti peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah mengacu

pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 dan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 dengan klasifikasi untuk Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Persentase (%) Alokasi Anggaran Pengawasan APIP**

No	Total Belanja Daerah Kabupaten / Kota	% Anggaran Pengawasan
1.	s.d Rp. 1.000.000,000.000,-	1%
2.	Diatas Rp. 1.000.000.000.000,- s.d Rp. 2.000.000.000.000,-	0,75%
3.	Diatas Rp. 2.000.000.000.000,-	0.50%
	Catatan : Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan	

Inspektorat Daerah Kota Salatiga selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) fokus pada penguatan pengawasan dalam rangka pengawasan yang lebih efektif untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan strategi Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

**2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.**

Kenaikan pagu RKPD tahun 2025 adalah Rp. 12.560.247.000 merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Salatiga terhadap penguatan pengawasan dimana untuk Presentasi (%) Alokasi Anggaran Pengawasan APIP diatas Rp. 1.000.000.000.000,- s.d Rp. 2.000.000.000.000,- persentase anggaran pengawasan seharusnya 0,75% di luar belanja gaji dan tunjangan ASN.

**Pagu anggaran pengawasan untuk menunjang penguatan pengawasan  
Kota Salatiga**

No	Tahun	Anggaran Total APBD	Total Anggaran Inspektorat	Anggaran	%
1.	2021	1.068.992.597.512,-	7.180.718.948,-	total	0,67%
2.	2022	1.023.950.446.242,-	7.696.927.509,-	total	0,75%
3.	2023	1.077.936.610.946,-	11.013.078.208,-	total	1,021%
4.	2024	998.140.851.621,-	9.547.875.429,-	total	0,95%
5	2025	1.132.234.238.788,-	2.932.498.368,-	Pengawasan	0,25 %.
			6.368.545.780,-	Gaji & tunjangan	0,562%

Anggaran belanja Inspektorat Daerah secara prosentase mengalami kenaikan secara bertahap sejak tahun 2021 upaya mendorong penguatan pengawasan Inspektorat Daerah dengan penguatan anggaran pengawasan 0,75% anggaran pengawasan di luar gaji dan tambahan penghasilan di tahun 2025 yang sudah disajikan dalam Tabel T-C.31 tentang reuiu RENSTRA Inspektorat Daerah pada tahun 2025 dengan format terlampir.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap RKPD pada Tahun 2026**

**OPD : Inspektorat Daerah**

No	RKPD pada Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (ribu)
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Salatiga				114.740.000,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Salatiga				147,379,949	
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang selesai di tindak lanjuti (pengawasan inspektorat +Itprov Jateng + BPKP) di bagi jumlah total rekomendasi pengawasan internal di kali 100%	%	90,10		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang selesai di tindak lanjuti (pengawasan inspektorat +Itprov Jateng + BPKP) di bagi jumlah total rekomendasi pengawasan internal di kali 100%	%	90,10		
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK RI dikali 100%	%	94,10		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK RI dikali 100%	%	94,10		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Salatiga	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	94.740.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Salatiga	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	95,000,000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	8.360.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	10,000,000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	26	14.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	26	15,000,000	
	Reviu Laporan Kinerja	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	10.100.000	Reviu Laporan Kinerja	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	14,000,000	
	Reviu Laporan Keuangan	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12	16.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12	20,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kerjasama Pengawasan Internal	Salatiga	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	30.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Salatiga	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	20,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	16.280.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	16,000,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	20.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	52,379,949	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	6.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	25,000,000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	10	14.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	10	27,379,949	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Salatiga				1.421.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Salatiga				<b>2,181,223,242</b>	
	Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Salatiga	Hasil Quality Assurance KPK atas Nilai MCSP Kota Salatiga	Nilai	94,60		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Salatiga	Hasil Quality Assurance KPK atas Nilai MCSP Kota Salatiga	Nilai	94,60		
	Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Salatiga	Jumlah penyelesaian pemeriksaan pengaduan masyarakat (DUMAS) dibagi jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk di kali 100%	%	100		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Salatiga	Jumlah penyelesaian pemeriksaan pengaduan masyarakat (DUMAS) dibagi jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk di kali 100%	%	100		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Salatiga	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	100	3.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Salatiga	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	%	100	10,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (ribu)
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Salatiga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5	3.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Salatiga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5	10,000,000	
	Pendampingan dan Asistensi	Salatiga	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	100	1.418.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Salatiga	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	100	2,171,223,242	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	32	350.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	32	478,000,000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	32	30.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	32	50,000,000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Salatiga	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	7	988.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Salatiga	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	7	1,563,223,242	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	32	50.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	32	80,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (ribu)
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga		Perangkat Daerah		11.024.507.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga		Perangkat Daerah		13,132,463,510	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Salatiga	Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan yang terlaksana di bagi jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintah di kali 100%	%	100		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Salatiga	Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan yang terlaksana di bagi jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintah di kali 100%	%	100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Salatiga	Jumlah capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 & 2 dibagi jumlah semester penyusunan IKM di kali 100%	%	81,4		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Salatiga	Jumlah capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 & 2 dibagi jumlah semester penyusunan IKM di kali 100%	%	81,4		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Salatiga	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP tahun N-1	Nilai	78,2		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Salatiga	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP tahun N-1	Nilai	78,2		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%	100	3.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%	100	9,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	14	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	14	8,000,000	
	Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektorat Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Inspektorat Daerah	Data	1		Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektorat Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Inspektorat Daerah	Data	1	500,000	
	Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Walidaya pendukung statistik	Dokumen	1		Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Walidaya pendukung statistik	Dokumen	1	500,000	

No	RKPD pada Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	%	100	5.556.359.268	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	%	100	7,295,480,008	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	44	236.446.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	44	6,880,480,008	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	5.319.913.268	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	415,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	22.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	25,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	22.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	510,000,000	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Salatiga	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.000.000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Salatiga	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	10,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Salatiga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	44	495.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Salatiga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	44	500,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	582.108.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	604,000,000	
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.000.000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (ribu)
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	14.006.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	18,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	55.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	62,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	29,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.102.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	18,000,000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	462.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	462,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	4.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	4,111,525,380	
	Pengadaan Mebel	Salatiga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit			Pengadaan Mebel	Salatiga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	12	111,525,380	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	4.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	4,000,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	66.207.016	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	73,500,000	

No	RKPD pada Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (ribu)
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	3,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	45.707.016	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	18.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	20,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	294.332.316	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	503,958,122	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	38.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	40,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	203.754.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	390,000,000	
	Pemeliharaan Mebel	Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	-	Pemeliharaan Mebel	Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	9,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (ribu)
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	40,000,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	10.573.416	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	20,950,122	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2.004.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	4,008,000	
	<b>TOTAL</b>					<b>12.560.247.000</b>						<b>15,461,066,701</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program yang sudah tertuang dalam Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

### A. Kebijakan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut diatas ditetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap perangkat daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah serta merupakan arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional, seperti:

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- c. penurunan prevalensi *stunting*.
- d. Swasembada pangan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pengawasan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pengawasan kinerja terhadap program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis daerah dan *mandatory spending* yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.
- c. Pengawasan tata kelola pemerintah melalui pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP) pada area intervensi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa,

Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan BMD, dan Optimalisasi Penerimaan Daerah.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui pengawasan *mandatory*, meliputi :

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, dengan fokus :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana keuangan Daerah
- 2) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
- 3) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
- 4) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
- 5) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus :

- 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
- 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- 3) Pengelolaan pembiayaan daerah.
- 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
- 5) Pengelolaan barang milik daerah.

c. Reviu Laporan Keuangan

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus :

- 1) Probit audit.
- 2) Laporan kinerja (reviu).
- 3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).
- 4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).
- 5) perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender/responsif gender (evaluasi).
- 6) Pendampingan penerapan standar pelayanan minimal.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas, yaitu:

- a. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN;
- b. Pengendalian gratifikasi;
- c. Pelaksanaan survei penilaian integritas;
- d. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan Zona Integritas;
- e. Pembangunan reformasi birokrasi;

- f. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan Stranas Pencegahan Korupsi;
  - g. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - h. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
  - i. Penanganan pengaduan masyarakat;
  - j. Evaluasi penanganan benturan kepentingan;
  - k. Evaluasi pelaksanaan WBS / WBBK;
  - l. Pemeriksaan investigatif;
  - m. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan fokus:
- a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
  - b. Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - c. Penerapan manajemen risiko;
  - d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang merupakan kegiatan masyarakat yang diusulkan merupakan arahan Nasional yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat adalah :

1. Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terkait dengan pengaduan masyarakat dan juga pengawasan tujuan tertentu.
2. Kegiatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dimana kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan upaya pemantauan upaya pencegahan korupsi di daerah, dimana stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dengan melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota se Indonesia.
3. kegiatan Pengendalian Gratifikasi dengan melibatkan *stakeholder* dalam hal ini dari dunia usaha dimana Kegiatan tersebut adalah

upaya mencegah korupsi di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dalam pengendalian Gratifikasi dan Pungutan Liar. Dalam table T-C.32.

**Tabel T-C.32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025**  
**KOTA SALATIGA**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA**

NO	Program / Kegiatan / Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Salatiga	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dumas dan TT)	10 laporan	
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
	Pendampingan dan Asistensi	Kota Salatiga	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100%	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Salatiga	Sosialisasi Saber Pungli	1 Kegiatan	
			Kegiatan MCSP KPK	1 kegiatan	
			Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	1 Kegiatan	
			Monev UPG unit kerja	1 Kegiatan	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

##### **3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional**

Salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang ditandai dengan adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, terbukanya peran serta masyarakat yang dapat menjamin kelancaran & keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan nasional. Untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggung jawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat diperlukan upaya yang komprehensif, dan terintegrasi guna mendorong peningkatan kinerja birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dalam mewujudkan *good governance dan clean government*, maka arah kebijakan nasional sebagai berikut :

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, dengan cara sebagai berikut :
  - a. Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua jenjang pemerintahan dan kegiatan.
  - b. Peningkatan budaya kerja aparatur.
  - c. Peningkatan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
  - d. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

### **3.1.2 Telaahan Kebijakan Provinsi**

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030 yang tertuang dalam *Blue Print* Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “NGOPENI. NGLAKONI. Jateng”. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan”. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH yang akan diwujudkan sebagai berikut.

1. Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah
2. Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan
3. Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter

Dalam sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif sebagai bagian dari transformasi tata kelola di Jawa Tengah. Upaya transformasi tata kelola merupakan arus utama dalam rangka mendorong penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang adaptif, yaitu pemerintahan yang senantiasa mampu menyesuaikan dalam menghadapi gejolak maupun perubahan yang seringkali terjadi lebih cepat melalui regulasi adaptif dan tidak tumpang tindih, sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan yang

kompeten dan profesional, budaya kerja efektif dan efisien, didukung dengan digitalisasi dan pengawasan pengendalian berbasis risiko yang independen. Selain itu, tata kelola pemerintahan didorong untuk lebih inklusif yaitu terbuka dalam berkolaborasi dengan lintas sektor (*hexahelix*) untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tujuan pembangunan sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan juga didorong untuk mengedepankan nilai-nilai integritas dan anti korupsi sehingga dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, serta penyusunan kebijakan pemerintahan yang lebih akuntabel, sehingga dapat menghadirkan pelayanan publik yang prima dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Guna mendukung upaya transformatif tersebut, perwujudan stabilitas pembangunan daerah dalam bentuk demokrasi yang lebih substantif menjadi penting, dimana kebebasan dan kesetaraan dalam penyediaan ruang dialog dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Demokrasi yang lebih substantif dapat menciptakan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak warga negara sehingga mendorong terwujudnya ketentraman dan kondusivitas wilayah. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. *Willingness to pay* masyarakat dalam membayar pajak yang semakin tinggi akan mendorong investasi menjadi semakin besar sehingga mendorong peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintahan berintegritas dan kolaboratif akan mampu menyesuaikan strategi fiskal dengan dinamika kondisi perekonomian sehingga menghasilkan kapasitas fiskal yang memadai. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, daerah memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan program pembangunan yang tepat sasaran, menyediakan layanan publik yang optimal, dan menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Otonomi Fiskal Daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat**

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian visi dan misi

diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Salatiga dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan target pencapaian yang telah dimuat dalam dokumen RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Perda No. 7 Tahun 2024).

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah: *“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”* Inspektorat Daerah Kota Salatiga melaksanakan misi pembangunan ke 3 (tiga) yaitu: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.*

Tujuan dan sasaran Pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025 – 2029 yang diintervensi Inspektorat Daerah, Tujuan : Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia. Sasaran ketiga (3) : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Berbasis Digital.

Tujuan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**“meningkatkan kualitas pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berintegritas”**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

- 1. Terlaksananya penguatan pengawasan dan perbaikan Sistem Pengendalian Intern penyelenggaraan pemerintahan terintegrasi.**
- 2. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian risiko korupsi.**

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2026-2029**

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berintegritas		Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Hasil Quality Assurance BPKP atas Maturitas SPIP Kota Salatiga	Nilai	3	3	3	3,02	3,04	3,06	3,08
Peraturan Nomor : PER-01/AAPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia		Terlaksananya penguatan pengawasan dan perbaikan Sistem Pengendalian Intern penyelenggaraan pemerintahan terintegrasi	Nilai Level kapabilitas APIP	Hasil Quality Assurance BPKP atas Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3	3,01	3,02	3,03	3,04
		Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian risiko korupsi	Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Hasil Quality Assurance BPKP atas Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Nilai	2,8	2,84	2,88	2,92	2,96	3	3

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs terhadap rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah pencapaian visi dan misi Kepala daerah serta tujuan sasaran Pemerintah Daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan Pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025 – 2029 yang diintervensi Inspektorat Daerah, Tujuan : Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia. Sasaran ketiga (3) : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Berbasis Digital maka dalam mendukung tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatornya selama periode tahun 2025 – 2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan di Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah juga memberikan dukungan terhadap capaian program Nasional, NSPK, SPM dan SDGS.

No	Program Prioritas Wali Kota	Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dampak Terhadap Program Nasional	Hubungan dengan NSPK	Hubungan dengan SPM	Hubungan dengan SDGS
1.	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan  Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Adanya harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana memberikan dukungan dan selaras dengan program Nasional yang termuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 7 yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Upaya Pencegahan Korupsi harus meningkatkan Indeks Integritas Nasional (SPI) Pemerintah Daerah	Pengawasan APIP memperhatikan jenis dan mutu pelayanan pengawasan yang wajib diterapkan dalam menjalankan tugas yang bertujuan memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Pengawasan APIP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tersebut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan tujuan SDGs lainnya melalui pengawasan dan pembinaan

### **3.3.2 Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan**

Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2025 – 2029 berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Inspektorat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi menjalankan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat Daerah;
- c. Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah;

##### **1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

##### **1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

##### **1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

##### **1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD;

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel;
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Mebel;
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;

**2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - c. Reviu Laporan Kinerja;
  - d. Reviu Laporan Keuangan;
  - e. Kerjasama Pengawasan Internal;
  - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah;
  - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**
- 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan
- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan;
- 2.2 Pendampingan dan Asistensi
- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
  - b. Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - d. Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C.33 yaitu sebagai berikut :

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2026					Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan			salatiga		114.740.000,00	APBD			125.714.000
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang selesai di tindak lanjuti (pengawasan inspektorat +Itprov Jateng + BPKP) di bagi jumlah total rekomendasi pengawasan internal di kali 100%	%		90,10				90,15	-
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK RI dikali 100%	%		94,10				94,15	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	salatiga	100	94.740.000	APBD		100	104.214.000
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	salatiga	48	8.360.000	APBD		48	9.196.000
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	salatiga	26	14.000.000	APBD		26	15.400.000

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	salatiga	4	10.100.000	APBD		4	11.110.000
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	salatiga	12	16.000.000	APBD		12	17.600.000
	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	salatiga	1	30.000.000	APBD		1	33.000.000
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	salatiga	4	16.280.000	APBD		4	17.908.000
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	salatiga	100	20.000.000	APBD		100	21.500.000
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	salatiga	1	6.000.000	APBD		1	7.000.000
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	salatiga	10	14.000.000	APBD		10	14.500.000
	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			salatiga		1.421.000.000	APBD			1.487.500.000

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2026					Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Hasil Quality Assurance KPK atas Nilai MCSP Kota Salatiga	Nilai		94,60				94,70	-
		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Jumlah penyelesaian pemeriksaan pengaduan masyarakat (DUMAS) dibagi jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk di kali 100%	%		100				100	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	salatiga	100	3.000.000	APBD		100	3.500.000
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	salatiga	5	3.000.000	APBD		5	3.500.000
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	salatiga	100	1.418.000.000	APBD		100	1.484.000.000
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	salatiga	32	350.000.000	APBD		32	396.000.000

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2026					Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	salatiga	32	30.000.000	APBD		32	33.000.000
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	salatiga	7	988.000.000	APBD		7	1.000.000.000
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	salatiga	32	50.000.000	APBD		32	55.000.000
	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah	salatiga		11.024.507.000	APBD			12.226.667.098
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan yang terlaksana di bagi jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintah di kali 100%	%		100				100	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	%		81,4				81,5	-

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2026					Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Semester 1 & 2 dibagi jumlah semester penyusunan IKM di kali 100%								
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP tahun N-1	Nilai		78,2				78,4	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%	salatiga	100	3.000.000	APBD		100	3.500.000
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	salatiga	14	3.000.000	APBD		14	3.500.000
		Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Inspektorat Daerah	Data	salatiga	1		APBD		1	-
		Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Walidaya pendukung statistik	Dokumen	salatiga	1		APBD		1	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	%	salatiga	100	5.556.359.268	APBD		100	6.152.204.593
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	salatiga	44	236.446.000	APBD		46	300.300.000

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	salatiga	1	5.319.913.268	APBD		1	5.851.904.593
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	salatiga	100	22.500.000	APBD		100	24.750.000
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	salatiga	1	22.500.000	APBD		1	24.750.000
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	salatiga	100	500.000.000	APBD		100	600.500.000
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	salatiga	1	5.000.000	APBD		1	5.500.000
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	salatiga	44	495.000.000	APBD		46	595.000.000
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	salatiga	100	582.108.400	APBD		100	649.119.240
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	salatiga	2	8.000.000	APBD		2	8.800.000

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	salatiga	4	14.006.400	APBD		4	15.407.040
	6.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	salatiga	14	55.000.000	APBD		14	60.500.000
	6.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	salatiga	14	25.000.000	APBD		14	27.500.000
	6.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	salatiga	12	3.102.000	APBD		12	3.412.200
	6.01.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	salatiga	36	15.000.000	APBD		36	16.500.000
	6.01.01.2 .06.0008	Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	salatiga	100	462.000.000	APBD		100	517.000.000
	6.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	salatiga	100	4.000.000.000	APBD		100	4.400.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	salatiga			APBD			-

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2026					Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	salatiga		-	APBD		20	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	salatiga	1	4.000.000.000	APBD		1	4.400.000.000
	6.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	salatiga	100	66.207.016	APBD		100	72.827.718
	6.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	salatiga	12	2.500.000	APBD		12	2.750.000
	6.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	salatiga	12	45.707.016	APBD		12	50.277.718
	6.01.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	salatiga	12	18.000.000	APBD		12	19.800.000
	6.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	salatiga	100	294.332.316	APBD		100	323.765.548

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	6.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	salatiga	1	38.000.000	APBD		1	41.800.000
	6.01.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	salatiga	18	203.754.900	APBD		18	224.130.390
	6.01.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	salatiga	3	-	APBD		3	-
	6.01.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	salatiga	40	40.000.000	APBD		40	44.000.000
	6.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	salatiga	1	10.573.416	APBD		1	11.630.758
	6.01.01.2 .09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	unit	salatiga	2	2.004.000	APBD		2	2.204.400

No	Kode rekening	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2026					Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
		<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>					<b>12.560.247.000</b>				<b>13.839.881.098</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan total pagu anggaran Rp15.329.765.861,- (Lima belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terbagi dalam 3 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan kebutuhan dana / pagu anggaran Rp. 13.020.937.991,- (Tiga belas milyar dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan indikator kinerja program tahun 2026 yaitu:
  - a. persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintah daerah dengan target kinerja 100%;
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 81,4%;
  - c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja nilai 78,2%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan dana / pagu anggaran Rp. 146.128.346,- (seratus empat puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)
  - a. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1 dengan target kinerja 90,10%;
  - b. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 dengan target kinerja 94,10%.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan dana / pagu anggaran Rp. 2.162.699.524,- (dua milyar seratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan indikator kinerja program tahun 2026 yaitu:
  - a. Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) dengan target kinerja 94,60%;
  - b. Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) dengan target kinerja 100%.

Tabel 4.1

## Pagu dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026

No	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Captain		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Salatiga				114.740.000	
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang selesai di tindak lanjuti (pengawasan inspektorat +Itprov Jateng + BPKP) di bagi jumlah total rekomendasi pengawasan internal di kali 100%	%	90,10		
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK RI dikali 100%	%	94,10		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Salatiga	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	94.740.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	8.360.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	26	14.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	10.100.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12	16.000.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Salatiga	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	30.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	16.280.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	20.000.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	6.000.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	10	14.000.000	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Salatiga				1.421.000.000	
	Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Salatiga	Hasil Quality Assurance KPK atas Nilai MCSP Kota Salatiga	Nilai	94,60		
	Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Salatiga	Jumlah penyelesaian pemeriksaan pengaduan masyarakat (DUMAS) dibagi jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk di kali 100%	%	100		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Salatiga	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	%	100	3.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Salatiga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5	3.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Salatiga	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	100	1.418.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	32	350.000.000	

No	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Captain		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	32	30.000.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Salatiga	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	7	988.000.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	32	50.000.000	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga		Perangkat Daerah		11.024.507.000	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Salatiga	Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan yang terlaksana di bagi jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintah di kali 100%	%	100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Salatiga	Jumlah capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 & 2 dibagi jumlah semester penyusunan IKM di kali 100%	%	81,4		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Salatiga	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP tahun N-1	Nilai	78,2		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%	100	3.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	14	3.000.000	
	Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektorat Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Inspektorat Daerah	Data	1	-	
	Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Walidaya pendukung statistik	Dokumen	1	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	%	100	5.556.359.268	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	44	5.319.913.268	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	236.446.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	22.500.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	22.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	500.000.000	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Salatiga	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Salatiga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	44	495.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	582.108.400	
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	14.006.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	55.000.000	

No	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Captain		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.102.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	15.000.000	
	Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	462.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	4.000.000.000	
	Pengadaan Mebel	Salatiga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	4.000.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	66.207.016	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	45.707.016	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	18.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	294.332.316	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	38.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	203.754.900	
	Pemeliharaan Mebel	Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	40.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	10.573.416	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2.004.000	
	<b>TOTAL</b>					<b>12.560.247.000</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya (2024), tahun berjalan (2025) dan tahun selanjutnya (2027) pelaksanaannya dapat terus dan berkesinambungan. Pemerintah Kota Salatiga perlu memberikan dukungan dalam memperkuat peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 4 (empat) elemen yaitu : Kelembagaan APIP, Anggaran APIP, Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dan Fokus Pengawasan.

Alokasi anggaran pengawasan yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menindaklanjuti peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022, namun dalam pelaksanaannya Inspektorat Daerah Kota Salatiga juga memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran di Pemerintah Kota Salatiga dengan optimalisasi anggaran namun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah tetap dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

#### **4.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renja\ dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.

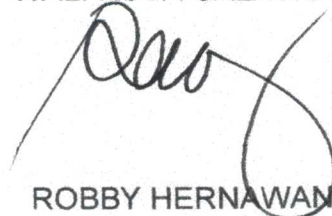
3. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang telah menpedomani Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah tahun 2026-2029, yang dilaksanakan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perlu disusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan memuat tindak lanjut atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam segi penanggung jawab, operasionalisasi kegiatan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana strategis dan mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan kesungguhan dan sikap yang profesional dari setiap personil yang ada di jajaran Inspektorat Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dari seluruh aparat pemerintah.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN

## **Lampiran**

# **SK RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2026**



## WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 000.7.2/446/2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

b. Bab IV : Penutup.

KEDUA

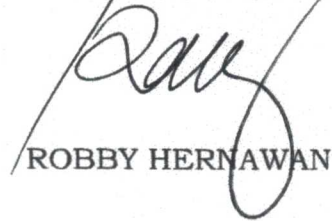
: Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 04 NOV 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Cemara No. 38 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325518  
Fax. (0298) 325518 Situs <https://irda.salatiga.go.id>  
Surat Elektronik [irda@salatiga.go.id](mailto:irda@salatiga.go.id)

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SALATIGA

NOMOR : .....700/26/300/2025.....

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026

INSPEKTUR KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu dibentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. menyiapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab pada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Salatiga  
pada tanggal : 2 Juni 2025

INSPEKTUR KOTA SALATIGA



MUTHOIN

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
3. Segenap Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR : 700 / 26 / 300 / 2025  
TANGGAL : 2 Juni 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Ketua
3.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah	Anggota
9.	PPUPD Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota
10.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota
11.	PPUPD Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
12.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
13.	Staf pada Inspektorat Daerah	Anggota

INSPEKTUR KOTA SALATIGA



MUTHOIN

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
  2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Inspektur Kota Salatiga



Drs. MUTHQIN, M. Si  
NIP. 196901091990011002

Koordinator Tim Verifikasi Bidang  
Kesejahteraan Masyarakat  
Kabid Perenc/ Kesra BAPPEDA  
Kota Salatiga



AZIS MUSLIM, SE, MM  
NIP. 497402172005011005

Formulir E.70  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
Inspektorat Daerah Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.		✓	Belum ada	Sudah Di TL
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.		✓	Belum ada	Sudah di TL
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Belum ada	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.		✓	Akan di sahkan setelah perbaikan ini	

## Lampiran 2 :

Berita Acara Hasil Verifikasi Renja PD  
Tahun 2026Formulir E.71  
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
Inspektorat Daerah Kota Salatiga

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Sudah ada rumusan, tapi acuan dokumen di atasnya (sudah disesuaikan dengan Renstra 25-29)
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Untuk program kegiatan mendukung prioritas kota, prov dan nasional belum ada

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD	✓		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda 7/2025 ttg RPJMD 25-29</li> <li>- Tambahkan perwali nomor 25 tahun 2025 tentang RKPD Kota Salatiga Tahun 2026</li> <li>- Tambahkan perda provinsi jawa tengah tentang RPJPD</li> <li>- Tambahkan perda kota salatiga tentang RPJPD</li> <li>- Perda yang tidak berlaku agar dihapus</li> <li>- RPD mohon di hapus</li> </ul> <p><b>(sudah di TL)</b></p>
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	✓		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	✓		<p>Sub bab 2.1 Evaluasi tahun 2024</p> <p>Sub bab 2.4 Review thdp RKPD</p> <p><b>(sudah di TL)</b></p>
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29	✓		<p>Kolom 10 dan 11 adalah tahun 2025</p> <p><b>(sudah di TL)</b></p>
II.2	Analisa Kinerja Pelayanan	IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30	✓		
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis PD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis terkait pelayanan;</li> <li>2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi;</li> <li>3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas;</li> <li>4. Tantangan dan peluang;</li> <li>5. Formulasi isu penting</li> </ol>	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun n.			
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai	✓		
II.4	Review terhadap RKPD	Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan Tabel T-C. 31	✓		Halaman 40, judul Review thdp RKPD 2026 (tidak pakai rancangan dan perubahan)  Review thdp Renstra 2025-2029 yang menjadi acuan (masuk pada dokumen rancangan Awal renja), akan tetapi yg di cantumkan Adalah data dari RKPD dan Analisis kebutuhan  <b>(sudah di TL)</b>
II.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Tabel T-C.32	✓		Lengkapi dengan data usulan dari Pokir, Musrenbang maupun Hibah jika ada.  <b>(Sudah di TL)</b>
III.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.	✓		Sesuaikan perodesasi acuan dokumen di atasnya, menggunakan dokumen 25-29.  Acuan Nasional, Provinsi serta RPJMD kota  <b>(sudah di TL)</b>
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026	Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		<p>Berisikan Penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;</li> <li>2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan;</li> <li>3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;</li> <li>4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33</li> </ol>			
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI)	✓		
V	Penutup	<p>Bab ini memuat diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.</li> <li>3. Rencana tindak lanjut.</li> </ol>	✓		<p>Sesuaikan narasi dengan kaidah di samping</p> <p><b>(sudah di TL)</b></p>

Formulir E.70  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
Inspektorat Daerah Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.		✓	Belum ada	Sudah Di TL
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.		✓	Belum ada	Sudah di TL
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Belum ada	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.		✓	Akan di sahkan setelah perbaikan ini	

Lampiran 2 :  
Berita Acara Hasil Verifikasi Renja PD  
Tahun 2026

Formulir E.71  
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
Inspektorat Daerah Kota Salatiga

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Sudah ada rumusan, tapi acuan dokumen di atasnya (sudah disesuaikan dengan Renstra 25-29)
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Untuk program kegiatan mendukung prioritas kota, prov dan nasional belum ada

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD	✓		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda 7/2025 ttg RPJMD 25-29</li> <li>- Tambahkan perwali nomor 25 tahun 2025 tentang RKPD Kota Salatiga Tahun 2026</li> <li>- Tambahkan perda provinsi jawa tengah tentang RPJPD</li> <li>- Tambahkan perda kota salatiga tentang RPJPD</li> <li>- Perda yang tidak berlaku agar dihapus</li> <li>- RPD mohon di hapus</li> </ul> <p><b>(sudah di TL)</b></p>
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	✓		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	✓		<p>Sub bab 2.1 Evaluasi tahun 2024</p> <p>Sub bab 2.4 Review thdp RKPD</p> <p><b>(sudah di TL)</b></p>
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29	✓		<p>Kolom 10 dan 11 adalah tahun 2025</p> <p><b>(sudah di TL)</b></p>
II.2	Analisa Kinerja Pelayanan	IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30	✓		
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis PD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis terkait pelayanan;</li> <li>2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi;</li> <li>3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas;</li> <li>4. Tantangan dan peluang;</li> <li>5. Formulasi isu penting</li> </ol>	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun n.			
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai	✓		
II.4	Review terhadap RKPD	Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan Tabel T-C. 31	✓		Halaman 40, judul Review thdp RKPD 2026 (tidak pakai rancangan dan perubahan)  Review thdp Renstra 2025-2029 yang menjadi acuan (masuk pada dokumen rancangan Awal renja), akan tetapi yg di cantumkan Adalah data dari RKPD dan Analisis kebutuhan  <b>(sudah di TL)</b>
II.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Tabel T-C.32	✓		Lengkapi dengan data usulan dari Pokir, Musrenbang maupun Hibah jika ada.  <b>(Sudah di TL)</b>
III.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.	✓		Sesuaikan perodesasi acuan dokumen di atasnya, menggunakan dokumen 25-29.  Acuan Nasional, Provinsi serta RPJMD kota  <b>(sudah di TL)</b>
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026	Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		<p>Berisikan Penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;</li> <li>2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan;</li> <li>3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;</li> <li>4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33</li> </ol>			
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI)	✓		
V	Penutup	<p>Bab ini memuat diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.</li> <li>3. Rencana tindak lanjut.</li> </ol>	✓		<p>Sesuaikan narasi dengan kaidah di samping</p> <p><b>(sudah di TL)</b></p>

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga, dengan hasil sebagai berikut :

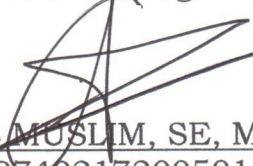
- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
  2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Inspektur Kota Salatiga



Drs. MUTHOIN, M. Si  
NIP. 196901091990011002

Koordinator Tim Verifikasi Bidang  
Kesejahteraan Masyarakat  
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA  
Kota Salatiga



AZIS MUSLIM, SE, MM  
NIP. 197402172005011005

## **Lampiran**

# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2026**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
INSPEKTORAT KOTA SALATIGA  
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>INSPEKTORAT</b>						<b>12.560.247.000,00</b>							<b>13.839.881.098,00</b>	
6		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>12.560.247.000,00</b>							<b>13.839.881.098,00</b>	
	6.01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>12.560.247.000,00</b>							<b>13.839.881.098,00</b>	
1.	6.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>11.024.507.000,00</b>						-	<b>12.226.667.098,00</b>	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah	-			100 %	3.000.000,00			-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	3.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		3.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	-			100 %	5.556.359.268,00			-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	6.152.204.594,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	5.319.913.268,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		5.851.904.594,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	236.448.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		300.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			100 %	22.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	24.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	22.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		24.750.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	500.000.000,00			-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	600.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		5.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				42 Orang	495.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		595.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	582.108.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	649.119.240,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	8.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		8.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	14.006.400,00	Kota Salatiga, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		15.407.040,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				26 Paket	55.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		60.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				24 Paket	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		27.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	3.102.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		3.412.200,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		16.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120 Laporan	462.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		517.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	4.000.000.000,00			-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	4.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	4.000.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		4.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	66.207.016,00			-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	72.827.717,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	2.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		2.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					6 Laporan	45.707.016,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		50.277.717,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	18.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		19.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			100 %	294.332.316,00			-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	323.765.547,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		41.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	203.754.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		224.130.390,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	40.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		44.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.573.416,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		11.630.757,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.004.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		2.204.400,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						114.740.000,00						-	125.714.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			100 %	94.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah dan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga	-	104.214.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				48 Laporan	8.360.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		9.196.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				26 Laporan	14.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		15.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				4 Laporan	10.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		11.110.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				12 Laporan	16.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		17.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Kesepakatan	30.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				4 Dokumen	16.280.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		17.908.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	-			100 %	20.000.000,00			-	-	OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga	-	21.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				10 Laporan	14.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		14.500.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>						1.421.000.000,00						-	1.487.500.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	-			100 %	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga	-	3.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				5 Rekomendasi	3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Inspektorat Daerah Kota Salatiga		3.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Persentase Laporan pendampingan dan asistensi</i>	-			100 %	1.418.000.000,00			-	-	Inspektorat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga	-	1.484.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / DUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				32 perangkat daerah	350.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		396.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	30.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		33.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				7 Kegiatan	988.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				32 perangkat daerah	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Inspektorat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		55.000.000,00	INSPEKTORAT
<b>J U M L A H</b>								<b>12.560.247.000,00</b>							<b>13.839.881.098,00</b>	